



RINGKASAN RISALAH RAPAT BERBASIS AGENDA

A. Informasi Umum

Tanggal Rapat : Rabu, 1 Juli 2015
Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : 35

B. Kehadiran Anggota

- 1. Fraksi PDI Perjuangan
- 2. Fraksi Partai Golongan Karya
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
- 4. Fraksi Partai Demokrat
- 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
- 6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
- 8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
- 9. Fraksi Partai Nasional Demokrat
- 10. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat
- 61 dari 106 orang anggota, izin 15
- 45 dari 90 orang anggota, izin 14
- 41 dari 73 orang anggota, izin 12
- 32 dari 60 orang anggota, izin 8
- 25 dari 48 orang anggota, izin 4
- 15 dari 47 orang anggota, izin 7
- 20 dari 40 orang anggota, izin 6
- 20 dari 39 orang anggota, izin 4
- 18 dari 36 orang anggota, izin 3
- 7 dari 16 orang anggota, izin 4

C. Agenda Rapat

1. Pandangan Fraksi-fraksi atas Pokok-pokok Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh pemerintah
2. Usulan program pembangunan daerah pemilihan

D. Ucapan Penting Per-Agenda Rapat

1. Pandangan Fraksi-fraksi atas Pokok-pokok Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh pemerintah

F-PDIP DANIEL LUMBAN TOBING

ISI UCAPAN

- Salam sejahtera bagi kita semua.Om swasti astu.Merdeka!Yang terhormat Pimpinan Sidang,Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan.Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengingat bahwa DPR RI ikut pula mengawasi akuntabilitas penggunaan anggaran negara oleh pemerintah.Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23 huruf e ayat (1), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN Perubahan Tahun 2014.
- Pemerintah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan keuangan kepada DPR.

F-PG Ir ZULFADHLI

ISI UCAPAN

- Hal ini penting untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin untuk menjamin nilai-nilai demokrasi terhadap jalur yang benar dan bersih.Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia,Terkait dengan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2014, Fraksi Partai Golkar berpandangan sebagai berikut:Dari sisi indikator ekonomi makro1.
- Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 lalu sebesar 5,06% atau lebih rendah dari tahun anggaran 2013 sebesar 0,72%.

F-P GERINDRA Ir BAMBANG HARYO SOEKARTONO

ISI UCAPAN

- Sementara itu agenda pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas dalam menggerakkan perekonomian nasional tidak banyak mengalami kemajuan.Bapak Ibu peserta sidang yang kami muliakan.Berdasarkan uraian di atas, kami dari Fraksi Partai Gerindra mengajak kita semua menyatukan visi dalam membahas Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 sebagai komitmen untuk melakukan koreksi terhadap praktek kebijakan fiskal agar bisa sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.Kami dari Fraksi Partai Gerindra setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.Demikian pandangan kami dari Fraksi Partai Gerindra, atas perhatiannya kami haturkan Terima kasih.Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.PIMPINAN FRAKSI PARTAI

GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua, Wakil Sekretaris, H.

- AHMAD MUZANI H, NOVITA WIJAYANTI, SE..

F-PD Ir H, MARWAN CIK ASAN, MM

ISI UCAPAN

- LKPP dalam Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 terdiri atas laporan realisasi APBN Tahun Anggaran 2014.
- Neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2014.

F-PAN ANDI TAUFAN TIRO, ST

ISI UCAPAN

- Realisasi belanja negara dalam Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp1.777,18 triliun yang berarti mencapai 94,69% dari APBN Tahun Anggaran 2014.
- Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.203,58 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp573,70 triliun.

F-PKB H CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, SA

ISI UCAPAN

- Fraksi PKB mendesak kepada Pemerintah untuk sungguh-sungguh memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dan menindaklanjuti saran-saran BPK terhadap LKPP Tahun Anggaran 2014 ini secara maksimal. Pimpinan, Sahabat Anggota dan Saudara Menteri Keuangan, serta Hadirin yang terhormat. Demikianlah beberapa pandangan kami terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2014 ini.
- Selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya untuk membahas RUU ini ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Atas segala perhatian, maka kami ucapkan terima kasih.

F- PKS H ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE, MSi, Akt

ISI UCAPAN

- Aamiin ya robbal'alami. 49 PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
Disampaikan oleh : Abdul Haris Almasyhari Nomor Anggota : A - 111
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta Hadirin yang kami hormati. Dalam menyikapi Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR pada Rapat Paripurna DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu memberikan beberapa catatan penting.
- Secara umum, Fraksi PKS memandang bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2014 kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya

pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1).

F-PPP Hj IRNA NARULITA, SE, MM

ISI UCAPAN

- 1 Juli 2015Juru bicara: Hj.

F- PARTAI NASDEM DONNY IMAM PRIAMBODO, ST, MM

ISI UCAPAN

- Fraksi Partai Nasdem mengharapkan di masa mendatang pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik sehingga mampu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas Fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 untuk dibahas lebih lanjut menjadi Undang-undang.Demikian pandangan Fraksi Partai Nasdem semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.Jakarta, 1 Juli 2015PIMPINAN FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI Sekretaris, Ketua,ttd ttdH.

- terima kasih disampaikan kepada Saudara Donny Imam Priambodo, S.T..

F-HANURA FERRY KASE, SH

ISI UCAPAN

- Membuat aturan atau payung hukum yang kuat yang ditetapkan melalui satu peraturan maupun regulasi terhadap beberapa pelanggaran yang terjadi sehingga kesalahan tersebut tidak terjadi berulang-ulang.Hadirin yang kami hormati.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Demikian pandangan Fraksi Partai Hanura DPR RI kami sampaikan.

- Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Jakarta, 1 Juli 2015PIMPINAN FRAKSI PARTAI HANURA DPR RI Sekretaris, Ketua,H.

2. Usulan program pembangunan daerah pemilihan

KETUA RAPAT

ISI UCAPAN

F-PG H MUKHAMAD MISBAKHUN, SE

ISI UCAPAN

- Maka demi menjembatani beragam usulan dan aspirasi pembangunan daerah tersebut DPR RI sebagai representasi rakyat memandang usulan program pembangunan daerah pemilihan sebagai sebuah mekanisme sistem untuk memutus missing link yang selama ini menghambat program pemerataan pembangunan di negari ini.Pimpinan dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati.Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan sebanyak Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang berjumlah 91 orang karena 1 orang belum dilantik, usulan yang diajukan menjadi 90 anggota.Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan DPR RI tentang mekanisme dan tata cara usulan program pembangunan daerah pemilihan yang telah

disepakati dalam Sidang Paripurna tanggal 23 Juni 2015 yang lalu dan ini merupakan proses konstitusi yang harus dilalui. Usulan-usulan tersebut merupakan aspirasi dari masing-masing daerah pemilihan yang selama ini belum terakomodir dalam program-program pembangunan yang ada.

- Untuk itu Fraksi Partai Golkar memandang usulan program pembangunan daerah pemilihan merupakan terobosan penting dalam rangka akselerasi pemerataan pembangunan di pelosok-pelosok tanah air. Pimpinan dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati. Terkait jumlah dan alokasi usulan program pembangunan daerah pemilihan Fraksi Partai Golkar mengedepankan ketentuan dan kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI pada saat pembahasan RAPBN 2016 nanti. Adapun rincian usulan program pembangunan daerah pemilihan dari masing-masing Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pandangan Fraksi Partai Golkar ini.

F-GERINDRA H BAMBANG RIYANTO, SH, MH, MSI

ISI UCAPAN

- Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh laporan maupun pengaduan-pengaduan tentang suatu keadaan wilayah atau daerah yang memerlukan pembangunan infrastruktur, baik itu berupa perbaikan jalan, jembatan, air bersih, lingkungan, sanitasi, peningkatan sarana keagamaan, peningkatan sarana keolahragaan dan lain-lain.

F-PD Ir E HERMAN KHAERON, MSI

ISI UCAPAN

- Kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN dan APBD yang tidak ditangani oleh eksekutif dalam perencanaannya.
- Betapa rumit dan kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing-masing pihak punya keinginan dan rencana sendiri; d.

F-PAN H TOTOK DARYANTO, SE

ISI UCAPAN

- Di mana usulan ini meliputi penyediaan air bersih, pembangunan dan perbaikan tempat ibadah dan prasarana keagamaan, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan ternak, benih dan bibit, penyediaan sarana internet, penyediaan penerangan jalan umum, pembangunan dan perbaikan jalan desa.

F-PKB Hj ROHANI VANATH

ISI UCAPAN

- Pembangunan fasilitas pengembangan sumber daya manusia, meliputi sarana olah raga dengan pembangunan GOR, sarana kesenian dengan penambahan alat-alat kesenian, serta perpustakaan atau taman bacaan umum dan didukung dengan sarana internet.
- Pembangunan dan perbaikan tempat pemakaman umum (TPU).

F-PKS Dr H ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP, M M

ISI UCAPAN

- ' ' j l l l ' ' r 'Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita: : , : *g| f - Ibisa menghadiri Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

F-PPP Dra ELVIANA, MSI

ISI UCAPAN

- Program Pembangunan Daerah Pemilihan pada satu sisi merupakan amanah konstitusi yakni sesuai dengan Pasal 80 huruf J Undang-undang No.

F HANURA MOH ARIEF S SUDITOMO, SH, MA

ISI UCAPAN